

**PARTISIPASI MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN
DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan HKm di Kecamatan Balusu
Kabupaten Barru)**

Ida Rosada¹, Annas Boceng¹, Erni Azis²

¹Dosen Program Magister Agroteknologi, Fakultas Pertanian,
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

²Mahasiswa Magister Agroteknologi, Fakultas Pertanian,
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Email : erniazis2000@yahoo.co.id ida.rosada@umi.ac.id bocenganas@ymail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify the implementation of the Social Forestry (SF) Program at the HKm Forest Farmer Group in Balusu District, Barru Regency, identify and analyze the level of community participation around the forest in the implementation of the social forestry program at the HKm Forest Farmer Group in Balusu District, Barru Regency and analyze the factors involved influencing the participation of communities around the forest in the implementation of SF programs at the HKm Forest Farmer Group in Balusu District, Barru Regency.

This research was conducted. The research location was carried out in Balusu District, Barru Regency, South Sulawesi Province in the SF Program at the KTH HKm Sero and Sarewe Groups. While the time needed to conduct this research is 2 (two) months, namely August to September 2020. The population in this study were all members of KTH HKm in Balusu Subdistrict totaling 82 people, consisting of 45 KTH Sero, and KTH Sarewe, as many as 37 people. The sampling method was carried out by using the census method or taking all members of the HKm forest farmer group in Balusu District.

The research data analysis method is using the method of effectiveness analysis, qualitative descriptive analysis, percentage analysis and multiple linear analysis.

Therefore, to increase community participation in the management of hkm in Balusu sub-district, new regency, it is hoped that farmer groups need to be more active in assisting the government through the Forestry Service in developing Community Forestry (HKm) development programs in Balusu District, Barru Regency.

Keywords: social forestry; HKm; community participation.

PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (Bambang, 2016).

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah

melaksanakan program HKm. Program ini dilaksanakan di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Barru. Adapun luas kawasan hutan menurut fungsi dan administrasi per kecamatan di Kabupaten Barru tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut dapat dilihat dari tabel luas kawasan hutan menurut fungsi dan administrasi per kecamatan di kabupaten Barru tahun 2019.

Dalam konteks pelestarian dan pengembangan hutan melalui program perhutanan sosial di Kecamatan Balusu, tingkat partisipasi masyarakat perlu dikaji agar dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan adil sehingga diharapkan dapat

mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru di masa akan datang (Awang, 2017)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berupa studi kasus yang dilaksanakan pada KTH HKm Sero dan Sarewe di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru merupakan bagian penelitian kuantitatif yang data primernya dikumpulkan kuisioner sebagai instrumen penelitian untuk menganalisis fakta dan data-data yang menggambarkan karakteristik responden Kelompok Tani Hutan HKm yang meliputi : umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, tingkat pendapatan dan pengalaman bertani.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada Kelompok PS KTH HKm Sero dan Sarewe. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini yaitu selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus sampai September 2020.

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek di dalam penelitian yang dialami dan juga dicatat segala bentuknya yang ada di lapangan. Sampel adalah bagian kecil yang terdapat dalam populasi dan dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan.

Kecamatan Balusu memiliki 2 (dua) KTH HKm yaitu KTH Sero dan

KTH Sarewe. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KTH HKm di Kecamatan Balusu sejumlah 82 orang, yang terdiri atas KTH Sero sebanyak 45 orang, dan KTH Sarewe sebanyak 37 orang.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus atau mengambil seluruh anggota kelompok tani hutan HKm di Kecamatan Balusu. Penentuan jumlah sampel tersebut berdasarkan pendapat Arikunto (1997) yang menyatakan bahwa apabila jumlah subjek (populasi) kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya, namun jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% dari total populasi. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 82 orang sebagai responden.

Analisis data penelitian: metode analisis efektifitas, analisis deskriptif kualitatif, analisis persentase dan analisis linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu kegiatan. Efektivitas dalam kegiatan KTH HKm Sero dan KTH HKm Sarewe dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

No	Indikator Kegiatan Partisipasi	Jumlah Responden Melaksanakan Kegiatan	Total Responden	Persentase (%)	Kategori
1	Pertemuan	45	82	54,87	Kurang Efektif
2	Pengajuan usul	62	82	75,6	Cukup Efektif
3	Pengambilan keputusan	50	82	60,9	Kurang Efektif
4	Pengelolaan lokasi HKm	56	82	68,29	Cukup Efektif
5	Pemahaman Teknis Kegiatan	42	82	51,21	Kurang Efektif
6	Manfaat Sosial	42	82	51,21	Kurang Efektif
7	Ekonomi	37	82	45,12	Kurang Efektif
8	Lingkungan	54	82	65,85	Cukup Efektif
9	Pertemuan	69	82	84,14	Efektif
10	Pengembangan Kelompok	50	82	60,9	Kurang Efektif
Persentase Rata-Rata Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi				61.80	Cukup Efektif

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat pada KTH HKm Sero dan Sarewe termasuk dalam kategori cukup efektif dengan nilai 61,80%

Tingkat Partisipasi

Partisipasi Dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan.

Dilaksanakan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai pedoman dan proses kontrol dalam pelaksanaan kegiatan nantinya sehingga hal yang terpenting akan menjadi prioritas utama.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

No	Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tinggi	66,68 – 100	16	19,52
2	Sedang	33,34 – 66,67	25	30,48
3	Rendah	0 – 33,33	41	50,00
Total			82	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 2. Menunjukkan tingkat partisipasi tinggi dalam masyarakat pada pengambilan keputusan di Kecamatan Balusu memiliki persentase terendah (19,25 %) dengan jumlah petani 16 orang, partisipasi sedang memiliki nilai partisipasi tertinggi (50%) yang dilaksanakan oleh 25 orang petani sedangkan tingkat partisipasi rendah

memiliki persentase 30,48% yang dilaksanakan oleh 41 orang petani.

Partisipasi Pelaksanaan

Keikutsertaan anggota KTH HKm Sero dan Sarewe dalam pelaksanaan kegiatan kelompok Perhutanan Sosial dalam pemanfaatan izin kelola HKm yang telah mereka miliki berupa penanaman dan pemeliharaan bibit tanaman.

Tabel 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

No	Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tinggi	66,68 – 100	21	25,60
2	Sedang	33,34 – 66,67	32	39,04
3	Rendah	0 – 33,33	29	35,36
Total			82	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tingkat partisipasi pelaksanaan kegiatan pada tingkat partisipasi sedang memiliki nilai persentase tertinggi (39,04%) yang dilaksanakan oleh 32 orang petani. Tingkat partisipasi pelaksanaan selanjutnya pada kategori rendah (35,36%) yang dilaksanakan oleh 29 orang petani serta tingkat partisipasi tinggi (25,60%) merupakan tingkat partisipasi

terendah yang dilaksanakan oleh 21 orang petani.

Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) berupa pemungutan buah-buahan/biji-bijian seperti kemiri, lebah madu, pengambilan nira dan pembuatan gula aren serta obat-obatan. Kegiatan *agroforestry* berupa penanaman hortikultura (sayuran), kopi, porang dan aren di dalam kawasan pada izin kelolanya.

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

No	Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tinggi	66,68 - 100	11	13,41
2	Sedang	33,34 – 66,67	39	47,56
3	Rendah	0 – 33,33	32	39,03
Total			82	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan tingkat partisipasi dalam pengambilan manfaat tertinggi pada kategori partisipasi sedang yaitu 39 orang (47,56%) selanjutnya tingkat partisipasi rendah yaitu 32 orang (39,03%) serta tingkat partisipasi terendah pada kategori tinggi yaitu 11 orang (13,41%).

Partisipasi Evaluasi

Evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari program yang sudah direncanakan sebelumnya yang dapat memberikan masukan demi perbaikan selanjutnya.

Tabel 5. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

No	Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tinggi	66,68 - 100	9	10,99
2	Sedang	33,34 – 66,67	22	26,82
3	Rendah	0 – 33,33	51	62,19
Total			82	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan tingkat partisipasi tinggi pada tahap evaluasi memiliki nilai persentase terendah (10,99%) yang dilaksanakan oleh 9 orang petani. Tingkat partisipasi sedang (26,82%) yang dilaksanakan oleh 22 orang petani serta tingkat partisipasi rendah (62,19%) yang dilaksanakan oleh 51 orang petani.

Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat di Sekitar Hutan dalam Program Perhutanan Sosial.

Tabel 6. Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

No	Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori	Persentase (%)
1	Partisipasi Perencanaan	33,34 – 66,67	Sedang	50
2	Partisipasi Pelaksanaan	33,34 – 66,67	Sedang	39,04
3	Partisipasi Pengambilan Manfaat	33,34 – 66,67	Sedang	47,56
4	Partisipasi Evaluasi	33,34 – 66,67	Sedang	62,19

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 6. Rekapitulasi partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program perhutanan sosial menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi program berada pada kategori sedang yang memerlukan pendekatan persuasif dan dengan pemberian materi dan kegiatan yang dapat lebih memotivasi petani untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan kelompok.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial (uji t) maupun secara bersama-sama (uji F). Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk merumuskan persamaan regresi dan untuk mengetahui nilai peningkatan atau penurunan variabel Y atas perubahan variabel X.

Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dengan lima variabel independen (X) yaitu sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1LNX_1 + b_2LNX_2 + b_3LNX_3 + b_4LNX_4 + b_5LNX_5 + e$$

Persamaan regresinya

$$Y = 3437,028 - 0,625X_1 + 129,145X_2 + 108,009X_3 + 19,363X_4 + 17,418X_5$$

Uji F :

Berdasarkan nilai hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, berdasar nilai F yaitu H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ (tidak berpengaruh):

- H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ (tidak berpengaruh)
- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (berpengaruh)

Berdasar nilai signifikansi:

- H_0 diterima jika nilai signifikansi $> 0,05$ (tidak berpengaruh)
- H_0 ditolak jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ (berpengaruh)

Uji t

Dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

- Ho: Tidak ada pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 secara parsial terhadap Y
- Ha: Ada pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 secara parsial terhadap Y

Kriteria pengambilan keputusan:

Berdasar nilai t:

- Ho diterima jika $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (tidak berpengaruh)
- Ho ditolak jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh)

Berdasar nilai signifikansi:

- Ho diterima jika nilai signifikansi $> 0,05$ (tidak berpengaruh)
- Ho ditolak jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ (berpengaruh)

Hasil Analisis Determinasi (*R Square*):

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variable X memberikan kontribusi terhadap variable Y. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variable independen secara serentak terhadap variable dependen.

Dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 0,039 atau 3,9% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada pelaksanaan program Perhutanan Sosial pada KTH HKm Sero dan Sarewe di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Perhutanan Sosial berada pada persentase tingkat efektivitas 61,80 persen pada kategori cukup efektif.
2. Nilai persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tergolong rendah yang dilihat jumlah responden sebanyak 41 orang dengan persentase sebesar 50,00%.

Nilai persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tergolong sedang yang dilihat jumlah responden sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 39,04%.

Nilai persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat tergolong sedang yang dilihat jumlah responden sebanyak 39 orang dengan persentase sebesar 47,56%.

Nilai persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi tergolong rendah yang dilihat jumlah responden sebanyak 51 orang dengan persentase sebesar 62,19%.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial seperti umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, tingkat pendapatan dan pengalaman bertani tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat.

Saran

1. Kelompok tani perlu lebih aktif dalam membantu pemerintah melalui Dinas Kehutanan dalam menyusun program pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.
2. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berhubungan dengan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, O dan Patana, P., 2016. *Perhitungan Nilai Ekonomi Pemanfaatannya Hasil Hutan Non – Marketable Oleh Masyarakat Desa Sekitar Hutan (Study Kasus Cagar Alam Dolok Sibual – Buali Kec. Sepirok Tapanuli Selatan)*.
- Arief, Arifin, 2015. *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Awang, 2017. *Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal*. Sleman: Banyumili Art Network.
- Bambang Pamukardi, 2016. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cahyaningsih, Nurka. 2016. *Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi*. Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program.
- Dephut, 1999. *Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.